



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120  
Telepon: (021) 8591 0031 (*Hunting*), Faksimile: (021) 8591 0030  
email: [humas@bpkp.go.id](mailto:humas@bpkp.go.id), website: [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

Nomor : OT.04/LPP-316/SU04/3/2022 8 April 2022  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Kinerja Biro Hukum dan  
Komunikasi Triwulan 1 Tahun 2022

Yth. Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Laksana  
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi  
Triwulan I Tahun 2022 sebagai berikut:

## A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Biro Hukum dan Komunikasi memiliki **empat** sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan **empat** indikator kinerja kegiatan (IKK) guna mengukur kinerja Biro. Sampai dengan triwulan I tahun 2022, target, realisasi dan capaian kinerja kegiatan tahun 2022 Biro Hukum dan Komunikasi disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Capaian Kinerja Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022**

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Kegiatan			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1 Meningkatkan kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1 Nilai area penguatan peraturan perundangan pada Indeks RB	Skala 1-5	3,16	N/A	N/A
2 Meningkatkan Reputasi BPKP	1 Indeks Reputasi BPKP	Skala 1-100	74	N/A	N/A
3 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hukum dalam	1 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Skala 1-100	71	N/A	N/A

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Kegiatan			
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5	6=5/4
	Pelaksanaan Tugas BPKP						
4	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	1	Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Skala 1-10	8,7	N/A	N/A

Adapun uraian dan analisis lebih lanjut mengenai capaian kinerja kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### SASARAN KEGIATAN 1: MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penguatan Peraturan Perundangan” diukur dari satu IKK, yaitu “Nilai Area Penguatan Peraturan Perundangan pada Indeks RB” dengan target nilai tahun 2022 sebesar 3,16.

Pada triwulan I Tahun 2022, Kementerian PAN-RB belum melaksanakan penilaian reformasi birokrasi BPKP sehingga “Nilai Area Penguatan Peraturan Perundangan pada Indeks RB” belum dapat disajikan nilainya (*Not Available*).

### SASARAN KEGIATAN 2: MENINGKATNYA REPUTASI BPKP

Dalam satu kesempatan, Presiden Jokowi berpesan bahwa tugas, fungsi, dan layanan dari pemerintah tidak hanya disampaikan, tetapi juga telah diterima oleh penggunanya, “tidak hanya *sent*, tapi juga *delivered*”. Terkait dengan hal tersebut, dalam kesempatan berbeda, Presiden juga berpesan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib membangun reputasi pemerintah, yang nantinya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menindaklanjuti arahan-arahan Presiden tersebut, BPKP terus berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk hadir dan memberikan manfaat kepada publiknya. Atas upaya tersebut, tentu BPKP perlu mengukur bagaimana penilaian dari publiknya, untuk memastikan tidak ada *gap* antara persepsi dan ekspektasi publik terhadap BPKP, atau disebut dengan pengelolaan reputasi. Sebagai bagian dari pengelolaan reputasi yang dilakukan oleh BPKP, BPKP telah membangun Indeks Reputasi BPKP. Indeks ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui persepsi dan ekspektasi publik BPKP, atau disebut dengan masyarakat reputasi BPKP. Atas pengelolaan hubungan yang dilakukan BPKP dengan masyarakat reputasinya, BPKP telah menetapkan indikator-indikator pada setiap tahapan, yaitu tahapan *inputs*, *outputs*, *outtakes*, dan *outcomes*.

Indeks Reputasi BPKP merupakan alat ukur pada tingkatan *outcomes*, yaitu penilaian yang diberikan oleh masyarakat reputasi BPKP atas upaya pengelolaan hubungan yang telah dilakukan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan survei kepada masyarakat sasaran (masyarakat reputasi BPKP), yang terbagi menjadi masyarakat umum, media massa, kelompok atau organisasi masyarakat, dan mitra kerja BPKP. Model Indeks Reputasi BPKP memiliki empat aspek yang terdiri dari aspek Kualitas, Kinerja, Tanggung Jawab, dan Daya Tarik. Empat aspek tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 20 indikator variabel yang pada ujungnya dapat menggambarkan posisi tingkat Reputasi BPKP, yang dinilai dari skala 1 sampai dengan 7 dengan gradasi kualitas reputasi sebagai berikut: 1. *Bad* – 2. *Poor* – 3. *Sufficient* – 4. *Neutral* – 5. *Good* – 6. *Excellent* – 7. *Superior*.

Pada tahun 2022, target Indeks Reputasi BPKP adalah 74 dari skala 100 atau 5,18 dari skala 7. Pengukuran Indeks Reputasi BPKP baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Indeks Reputasi belum dapat disajikan nilainya pada triwulan I Tahun 2022 (*Not Available*).

### **SASARAN KEGIATAN 3: PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM YANG TERSELESAIKAN**

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan diukur dari jumlah dokumen pendapat hukum dan dokumen penanganan perkara yang diselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan pendapat hukum dan berkas perkara yang diajukan pihak yang mengajukan komplain/gugatan kepada BPKP.

Pada tahun 2022, target Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan adalah 74 dari skala 100 atau 5,18 dari skala 7. Pengukuran indikator kinerja ini baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan belum dapat disajikan nilainya pada triwulan I Tahun 2022 (*Not Available*).

### **SASARAN KEGIATAN 4 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” diukur dari IKK “Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” dengan target nilai tahun 2022 sebesar 8,7. Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Indeks Reputasi belum dapat disajikan nilainya pada triwulan I Tahun 2022 (*Not Available*).

## **B. CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN**

*Output* Kegiatan sesuai dengan RKA Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2022 sebanyak empat indikator *output* kegiatan (IOK) dengan capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Output Kegiatan Triwulan I Tahun 2022**

No	Indikator <i>Output</i> Kegiatan (IOK) RKA/DIPA	Satuan	Output 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	15	4	26,7%
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	Laporan	30	N/A	N/A
3	Jumlah Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Dokumen	101 <sup>1)</sup>	N/A	N/A
4	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Laporan	31	10	32,2%

Keterangan:

<sup>1)</sup> Menggunakan target tahun 2021

Dari tabel 2 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IOK 1 “Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan” diukur dengan menghitung jumlah kegiatan analisis penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan triwulan I, realisasi *output* telah mencapai 4 Kegiatan atau mencapai 26,7% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- a) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundangan-undangan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) I
- b) Penyusunan Himpunan Peraturan BPKP Tahun 2021
- c) Penyusunan Analisis dan Deskripsi peraturan perundang-undangan I
- d) Penyusunan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP I

2. IOK 2 “Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum” diukur dengan menghitung jumlah Laporan Penelaahan Hukum dan Penanganan Bantuan Hukum yang dihasilkan.

Sampai dengan laporan ini diterbitkan, data untuk mengukur IOK ini belum tersedia (*Not Available*).

3. IOK 3 “Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang Terselesaikan” diukur dari jumlah dokumen permintaan pendapat hukum dan berkas perkara yang diajukan pihak yang mengajukan komplain/gugatan kepada BPKP.

Sampai dengan laporan ini diterbitkan, data untuk mengukur IOK ini belum tersedia (*Not Available*).

4. IOK 4 “Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi” diukur dari jumlah Laporan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang dihasilkan.

Sampai dengan triwulan I, realisasi *output* telah mencapai 10 Kegiatan atau mencapai 32,2% dari target Tahun 2022 yang telah ditetapkan, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- a) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Januari 2022
- b) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Januari 2022
- c) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Januari 2022
- d) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Februari 2022
- e) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Februari 2022
- f) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Februari 2022
- g) Laporan monitoring pengelolaan *website* BPKP bulan Maret 2022
- h) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Maret 2022
- i) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Maret 2022
- j) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Maret 2022

## C. PENGGUNAAN SUMBER DAYA

### 1. Penggunaan Dana

Penggunaan dana untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3**  
**Penggunaan Dana Triwulan I 2022**

No	Indikator <i>Output</i> Kegiatan (IOK)	Anggaran dan Realisasi Dana (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	431.200.000	30.121.947	6,98%
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	699.408.000	46.227.080	6,61%
3	Jumlah Permasalahan Hukum yang terselesaikan			
4	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	892.062.000	50.770.000	5,69%
<b>Jumlah</b>		<b>2.022.670.000</b>	<b>127.119.027</b>	<b>6,28%</b>

Berdasarkan data tabel di atas, realisasi anggaran Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 adalah sebesar Rp127.119.027 atau 6,28% dari target.

## 2. Penggunaan SDM

Realisasi penggunaan SDM untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan triwulan I tahun 2022 disajikan pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4**  
**Penggunaan SDM Tahun 2021**

No	Indikator <i>Output</i> Kegiatan (IOK)	Anggaran dan Realisasi SDM (OH)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	2.635	659	25,0%
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	2.259	560	24,79%
3	Jumlah Permasalahan Hukum yang terselesaikan			
4	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4.874	1.218	24,99%
<b>Jumlah</b>		<b>9.768</b>	<b>2.437</b>	<b>24,95%</b>

Sampai dengan triwulan I tahun 2022, SDM yang telah dialokasikan untuk mencapai target *output* adalah 2.437 OH dari target tahun 2022 9.768 atau 24,95%.

## D. KINERJA LAINNYA

Selain kinerja yang telah diuraikan di atas, di tahun 2022 Biro Hukum dan Komunikasi juga memperoleh penghargaan-penghargaan sebagai berikut:

1. *Gold Winner* kategori Lembaga sub kategori Media Cetak (majalah Warta Pengawasan edisi 4/2021) dari PR Indonesia tahun 2022.
2. *Silver Winner* kategori Lembaga sub kategori Media Sosial dari PR Indonesia tahun 2022.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro,

Eri Satriana

Tembusan Yth.:  
Sekretaris Utama BPKP (sebagai laporan)